

IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN WISATA BAHARI SONTOK LAUT BERBASIS MASYARAKAT DI KECAMATAN ASEMROWO KOTA SURABAYA

Munawarsyah Saosang

Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

munawarsyahsaosang.19044@mhs.unesa.ac.id

Badrudin Kurniawan

Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

Badrudinkurniawan@unesa.ac.id

Abstrak

Kota Surabaya merupakan salah satu tujuan wisata di Indonesia yang terkenal dengan berbagai jenis wisata. Hal tersebut sangat berdampak bagi masyarakat. Dampak tersebut juga dirasakan bagi masyarakat pesisir Sontok Laut yang pada kesehariannya bermata pencaharian sebagai nelayan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam mendukung pengembangan Wisata Bahari Sontok Laut dan untuk menganalisis bagaimana keterlibatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam mengelola Wisata Bahari Sontok Laut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan dari George Edward III yang mencakup empat variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan Wisata Bahari Sontok Laut belum diimplementasikan dengan baik sehingga belum dapat memenuhi keempat variabel tersebut. Selanjutnya, berdasarkan pembahasan dapat diketahui juga bahwa keterlibatan masyarakat masih minim, sehingga keberadaan Pokdarwis Sontok Laut selaku pengelola belum berdampak signifikan dalam peranannya untuk melibatkan masyarakat dalam pengembangan wisata. Oleh karena itu, untuk dapat mewujudkan wisata yang berkelanjutan juga harus diiringi dengan sinergitas antara pihak-pihak terkait. Diharapkan pemerintah, masyarakat dan swasta untuk tetap membina masyarakat sekitar Sontok Laut dengan melakukan pelatihan dan pendidikan secara terukur.

Kata Kunci : Pariwisata berbasis masyarakat, wisata bahari, keterlibatan masyarakat

Abstract

The city of Surabaya is one of the tourist destinations in Indonesia which is famous for various types of tourism. This has a huge impact on society. This impact is also felt by the coastal community of Sontok Laut, who in their daily life work as fishermen. This study aims to analyze the implementation of Surabaya City Government policies in supporting the development of Sea Sontok Marine Tourism and to describe how the Tourism Awareness Group (Pokdarwis) is involved in managing Sea Sontok Marine Tourism.

The type of research used is descriptive with a qualitative approach and data collection methods through observation, interviews, and documentation studies. This study was analyzed using the policy implementation theory from George Edward III which includes four variables, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results of the study indicate that the development of Sontok Laut Marine Tourism has not been implemented properly so it has not been able to fulfill these four variables. Furthermore, based on the discussion it can also be seen that community involvement is still minimal, so the existence of the Sea Sontok Pokdarwis as the manager has not had a significant impact on its role in involving the community in tourism development. Therefore, to be able to realize sustainable tourism must also be accompanied by a synergy between related parties. It is hoped that the government, community, and private sector will continue to foster the community around Sontok Laut by conducting measurable training and education.

Keywords: Policy, Community-based tourism, marine tourism, community involvement

PENDAHULUAN

Perkembangan industri pariwisata adalah bagaimana pariwisata berperan dalam proses pembangunan dan memberikan kontribusi pada ketahanan ekonomi nasional (Renstra Kemenparekraf 2020-2024). Kekayaan alam dan keanekaragaman yang dimiliki Indonesia menjadi peluang dan potensi yang sangat besar dalam mengembangkan pariwisata Indonesia agar lebih baik di mata dunia dan mempunyai ciri khas yang dilandasi kearifan lokal. Konsekuensinya, pemerintah memainkan peran penting dalam menentukan kebijakan pengembangan pariwisata dan menyelidiki potensi peluang pariwisata. Sehingga masyarakat di daerah tersebut sadar akan potensi dirinya dan terdorong untuk menggalinya serta termotivasi untuk mengembangkan daerahnya.

Tempat wisata di Indonesia memiliki berbagai macam jenis, tempat wisata tersebut antara lain wisata kuliner, wisata budaya, wisata olahraga, wisata bahari dan masih banyak jenis wisata yang lain. Menurut Kodhyat (dalam Kurniansah 2014:28) pariwisata merupakan suatu perjalanan dari satu titik ke titik berikutnya yang bersifat sementara, dilakukan secara perorangan atau kelompok, dengan tujuan untuk mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam tatanan sosial budaya, dan alam. Menurut Undang-Undang Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pariwisata adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata yang didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Tabel 1 Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara 2019-2021

No	Uraian	2019	2020	2021
1	Jawa Timur	99579825	126676862	155114120
2	Jawa Barat	722158733	524571392	603020000
3	Jawa Tengah	59838282	118895290	133341972
4	DKI Jakarta	57494172	44352288	51023328

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang tahun 2021 terdapat 603,2 juta perjalanan yang dilakukan oleh wisatawan nusantara, yang juga dikenal sebagai wisatawan lokal. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 14,95% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 523,57 juta trip. Berdasarkan tujuannya, Jawa Timur merupakan daerah yang paling

banyak dikunjungi wisatawan lokal. Jumlahnya 155,49 juta perjalanan atau setara dengan 25,79% total perjalanan traveller lokal. Kabupaten Malang, Kota Surabaya, dan Kabupaten Probolinggo merupakan kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur yang paling banyak diminati wisatawan domestik.

Pariwisata merupakan faktor pendorong di balik pertumbuhan kota. Pengembangan pariwisata merupakan salah satu aspek terpenting dalam meningkatkan perekonomian daerah sehingga pariwisata saat ini menjadi kontributor utama dalam upaya revitalisasi kota. Pariwisata, sebagai salah satu sektor industri terbesar, terus berkembang dari tahun ke tahun. Pengembangan obyek wisata harus tetap memperhatikan kenyataan bahwa tempat wisata memerlukan perubahan agar wisatawan tidak bosan dengan pemandangan yang sama dari waktu ke waktu. Pertumbuhan pariwisata di suatu kota dapat menjadi daya tarik yang unik bagi kota tersebut dan menjadi tujuan wisata yang populer bagi masyarakat. (Widyaningsih, 2020).

Beberapa daerah di Indonesia dapat menjadi contoh bagaimana kota memiliki potensi untuk berkembang menjadi tujuan wisata populer. Konsekuensi dari penerapan sistem desentralisasi telah memberi setiap daerah kesempatan untuk memaksimalkan setiap sumber daya yang mereka miliki. Daerah akan didesak untuk memanfaatkan setiap peluang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mereka sendiri. Banyak pemerintah kota yang memiliki wilayah pesisir saat ini tengah berupaya mempromosikan wisata bahari di wilayahnya. Misalnya, Pemerintah Kabupaten Takalar yang telah meningkatkan potensi wisata bahari daerahnya. Lokasi wisata bahari tersebut adalah Pantai Punaga. Pantai Punaga terletak di Desa Punaga, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Pantai Punaga adalah tempat liburan bahari yang populer dengan pasir putih, angin laut yang sejuk, dan tebing alami di sekelilingnya. Pantai Punaga berjarak 17 kilometer dari Kota Takalar.

Pengembangan pariwisata juga dapat mempercepat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pariwisata menghasilkan permintaan baik untuk investasi maupun konsumsi, yang pada akhirnya akan menghasilkan produksi barang dan jasa. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata pasal 4, tujuan pembangunan pariwisata nasional adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan

kesatuan bangsa, dan mempererat persahabatan antarbangsa.

Pemerintah Indonesia telah menyadari betapa pentingnya peran pariwisata daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Masyarakat yang tinggal di daerah atau lokasi yang populer di kalangan wisatawan sangat terpengaruh oleh industri pariwisata. Karena dianggap sebagai salah satu sektor strategis dalam mengembangkan perekonomian daerah sesuai dengan potensinya, pengembangan industri pariwisata merupakan salah satu program perencanaan pembangunan yang menjadi perhatian pemerintah daerah. (Aliansyah & Hermawan, 2021).

Namun, seiring dengan berkembangnya pariwisata di suatu daerah, tentunya memberikan dampak positif dan negatif. Dampak tersebut berpengaruh baik terhadap kondisi fisik maupun kehidupan sosial ekonomi masyarakat di sekitar lokasi wisata. Walaupun dampak positif dari pariwisata cukup banyak, namun masih banyak pula dampak negatif yang harus diminimalisir agar pengembangan pariwisata dapat berkelanjutan. Pariwisata berbasis masyarakat merupakan sebuah konsep yang dapat dipraktikkan dengan baik untuk menciptakan pariwisata berkelanjutan dari segi ekonomi, sosial dan lingkungan. Namun dengan potensi sumber daya alam dan budaya yang besar, dapat dikatakan capaian pariwisata Indonesia belum maksimal (Utami & Hartono, 2016).

Pemerintah Daerah juga memiliki kewenangan dalam mengatur daerah dan mengelola kekayaan yang ada di daerahnya tersebut. Pengaturan atas dasar hak ini berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan juga Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada pasal 2 ayat 4. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tersebut "Kebudayaan dan Pariwisata" merupakan salah satu urusan wajib yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata menyebutkan bahwa pembangunan pariwisata berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, serta melindungi lingkungan. Pemerintah di berbagai daerah sedang mengembangkan industri pariwisata. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga akan lebih menguntungkan masyarakat jika masyarakat diberdayakan secara penuh. Undang-Undang tersebut mengatur dan menentukan peran pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata, serta kepedulian dan komitmennya dalam menempatkan masyarakat pada keuntungan yang lebih besar.

Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata dan bersifat multidisiplin dan multidimensi yang muncul sebagai tanda kebutuhan setiap

individu dan negara serta interaksi antara wisatawan dengan masyarakat lokal, sesama wisatawan, pemerintah dan pengusaha. Hal itu diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 4 UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Sehingga dapat dilihat bahwa peran masyarakat lokal sangat besar dalam mengembangkan industri pariwisata. Padahal, dalam ketentuan pasal 5 dapat dilihat bahwa salah satu prinsip dalam penyelenggaraan kepariwisataan adalah pemberdayaan masyarakat lokal.

Dalam konteks lokal, pada lampiran Perda Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Bab II pasal 2 disebutkan bahwa dalam menyelenggarakan pengembangan kepariwisataan Pemerintah Daerah berwenang memberikan pembinaan antara lain melalui penyelenggaraan pelatihan kepariwisataan, sosialisasi regulasi kepariwisataan dan penyelenggaraan pembinaan masyarakat sadar wisata. Selanjutnya, mengenai teknis usaha pariwisata mengacu kepada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Usaha Pariwisata memuat petunjuk teknis pengelolaan usaha pariwisata di Kota Surabaya.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan kebijakan dan perencanaan yang tepat untuk memastikan penyatuan semua aktor di semua tingkatan dalam proses pembangunan dan distribusi biaya dan manfaat pariwisata yang merata (Adu-Ampong, 2017). Pariwisata berbasis masyarakat atau disebut juga dengan Community Based Tourism merupakan salah satu model pengembangan pariwisata yang sedang berkembang saat ini. Mountain Institute (2000) menegaskan bahwa pariwisata berbasis masyarakat harus berkontribusi pada penyediaan barang lokal yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan serta keuntungan ekonomi bagi masyarakat.

Maka dari itu, pentingnya melibatkan masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Prinsip sosial kepariwisataan berbasis masyarakat menguraikan strategi bagaimana masyarakat di sekitar destinasi wisata dapat dilibatkan dan berkontribusi untuk menghidupkan kembali potensi lokal yang ada. Tidak mungkin terwujud pariwisata yang berkelanjutan tanpa partisipasi langsung masyarakat. Konsep inilah yang dikenal sebagai Community Based Tourism (CBT).

Menurut Rahaju (2020), pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat nantinya diantisipasi memainkan peran penting dalam perubahan masyarakat lokal, tidak hanya dari sudut pandang ekonomi tetapi juga dari sudut pandang sosial dan lingkungan. Masyarakat lokal dapat memperoleh manfaat langsung dari pariwisata dengan terlibat dalam pengelolaannya. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, upaya tersebut dilakukan dengan memberikan dukungan, inspirasi, dan stimulasi agar masyarakat menyadari kemampuan dan potensinya serta melakukan berbagai upaya untuk mengembangkannya. (Ramdhani & Rahaju, 2022).

Melihat potensi wisata yang cukup besar di Wisata Bahari Sontoh Laut. Namun, proses implementasi pengembangan wisata ini masih menghadapi banyak tantangan. Diharapkan melalui implementasi pengembangan pariwisata di kawasan Wisata Bahari Sontoh Laut mampu merubah kondisi pariwisata menjadi lebih baik guna meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada saat pra-penelitian, menunjukkan bahwa sarana dan prasarana penunjang kegiatan Wisata Bahari Sontoh Laut masih sangat sedikit. Akses ke tempat Wisata Bahari Sontoh Laut juga masih sulit, ditandai dengan jalan sempit dan tidak rata. Tempat parkir yang disediakan tidak ada yang menjaga sehingga menimbulkan rasa khawatir bagi wisatawan serta tidak ada ruang tunggu untuk wisatawan. Perawatan di pantai dan gazebo sangat minim, termasuk cat yang mengelupas dan memudar. Ketersediaan listrik juga belum ada. Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan IH selaku Humas Pokdarwis Sontoh Laut sebagai berikut:

“Untuk fasilitas Wisata Bahari Sontoh Laut belum memadai, masih perlu perbaikan akses jalan, tempat UMKM, Perahu wisata, listrik dan tempat tunggu buat wisatawan.”(wawancara dengan IH selaku Humas Pokdarwis Sontoh Laut, Desember 2022).

Mengingat Pemerintah Kota Surabaya sudah mulai menunjukkan dukungannya terhadap pengembangan pariwisata di daerah. Sebagaimana dalam RKPD Kota Surabaya mengenai tentang Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 yang memuat pembangunan Kota Surabaya pada tahun 2022 diprioritaskan pada pemulihan ekonomi lokal melalui pengembangan inovasi produk, jasa, industri kreatif dan pariwisata. Langkah strategis untuk mendukung prioritas tersebut adalah dengan branding Kota Surabaya sebagai Kota Pariwisata dan pengembangan destinasi wisata dan kampung wisata.

Wisata Bahari Sontoh Laut masih menjadi tujuan wisata alternatif yang telah mulai dikunjungi wisatawan, baik wisatawan lokal maupun asing. Namun, pariwisata belum memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Setidaknya ada 3 (tiga) komponen yang harus bersinergi agar pembangunan pariwisata berhasil. Untuk mencapai suatu tujuan, pemerintah, swasta, dan masyarakat harus bekerja sama secara harmonis. (Setiawan & Kurniawan, 2021). Oleh karena itu, Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **Implementasi Pengembangan Wisata Bahari Sontoh Laut Berbasis Masyarakat di Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya.**

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif menggambarkan atau menganalisis hasil penelitian tetapi tidak menarik kesimpulan lebih lanjut. (Sugiyono, 2014). Adapun menurut Moleong (2012) menyatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif harus menjelaskan dengan kata-kata fenomena seperti persepsi, motivasi, dan tindakan yang dialami oleh peneliti.

Berdasarkan penelitian terdahulu dan pra riset yang dilakukan peneliti mengenai implementasi pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, bahwa untuk menjamin keberhasilan pembangunan kepariwisataan, implementasi pengembangan kepariwisataan sekurang-kurangnya memerlukan kerjasama yang efektif antara masyarakat setempat yang merupakan pelaku utama dalam pembangunan kepariwisataan dengan Pemerintah yang berperan sebagai fasilitator. Strategi yang ada tersebut bertumpu pada pilar-pilar berikut, yang peneliti rumuskan dalam fokus penelitian untuk menjawab rumusan masalah pertama:

Model implementasi kebijakan George Edward III digunakan oleh peneliti untuk menganalisis pembahasannya. Dengan menggunakan keempat faktor di atas, peneliti yakin model ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana kebijakan pengembangan pariwisata diimplementasikan. Empat variabel yang dimaksud adalah:

- Variabel Komunikasi (*Communication*).
- Variabel Sumber Daya (*Resources*)
- Variabel Disposisi (*Disposition*)
- Variabel Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*).

Dukungan dan partisipasi masyarakat sangat berperan dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata yang juga menjadi bahan penelitian. Sehingga untuk menjawab rumusan masalah kedua, peneliti menggunakan teori bentuk partisipasi Cohen dan Uphoff (dalam Dwiningrum, 2011:51) yang membagi partisipasi menjadi empat jenis, yaitu:

- Partisipasi dalam pengambilan keputusan (*Participation in Decision Making*)
- Partisipasi dalam pelaksanaan (*Participation in Implementation*)
- Partisipasi dalam pengambilan manfaat (*Participation in Benefits*)
- Partisipasi dalam evaluasi (*Participation in Evaluation*).

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah komponen penting dari proses karena digunakan

untuk mengumpulkan data, itulah sebabnya teknik tersebut sangat penting. Dalam hal ini, metode yang dipilih peneliti untuk mengumpulkan data adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

Dalam analisis data, peneliti menggunakan kemampuan penalaran untuk menghubungkan fakta dengan daya yang dikumpulkan dan diolah secara sistematis. Analisis kualitatif digunakan sebagai metode analisis data. Jenis analisis ini adalah ketika data empiris yang dikumpulkan adalah data kualitatif, biasanya berupa kumpulan kata yang ditempatkan dalam teks dan dianalisis tanpa menggunakan perhitungan matematis. Miles dan Huberman (dalam Silalahi, 2009) menyatakan bahwa saat melakukan analisis data, ada beberapa kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Wisata Bahari Sontoh Laut

Wisata Bahari Sontoh Laut berada di wilayah Kelurahan Tambak Sarioso, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya. Kecamatan Asemrowo termasuk dalam wilayah geografis Kota Surabaya yang merupakan bagian dari wilayah Surabaya Barat, dengan ketinggian kurang lebih 2,5 meter di atas permukaan laut.

Batas wilayah

Sebelah Utara : Selat Madura

Sebelah Timur : Kecamatan Sawahan dan Kecamatan

Bubutan

Sebelah Selatan : Kecamatan Sukomanunggal

Sebelah Barat : Kecamatan Tandes dan Kecamatan Benowo

Luas wilayah seluruh kecamatan Asemrowo kurang lebih 13,92 km persegi yang terbagi menjadi 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Tambak Sarioso, Kecamatan Asemrowo dan Kecamatan Genting Kalianak. Secara geografis, dari sisi utara terlihat aktivitas industri, dari sisi selatan terlihat laut yang indah dan ribuan burung bersarang di pohon bakau. Dari pusat Kota Surabaya membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk dapat mencapai wisata ini. Mata pencaharian utama warga di sekitar wisata ini adalah nelayan.

Wisata Bahari Sontoh Laut memiliki berbagai potensi wisata yang dapat dijadikan atraksi wisata. Beberapa potensi wisata tersebut sudah mulai dikembangkan oleh masyarakat, namun sebagian lainnya belum tersentuh. Masyarakat dapat memperoleh akses ke sumber pendapatan baru jika potensi penuh industri ini terwujud. Berikut ini adalah beberapa diantaranya:

1. Hutan Mangrove

Hutan mangrove sangat penting karena berbagai alasan, antara lain ketahanannya terhadap abrasi, kemampuannya menyerap limbah yang mencemari air, dan kemampuannya melindungi pantai dari deburan ombak dan angin kencang. Mangrove juga memainkan peran penting dalam

kehidupan burung. Hutan mangrove menjadi rumah bagi berbagai jenis burung darat dan air, yang menjadi salah satu tujuan utamanya. Dengan menawarkan kegiatan seperti penanaman mangrove dengan atraksi pembibitan mangrove, maka hutan mangrove dapat berkembang menjadi destinasi wisata edukasi. Oleh karena itu pengunjung akan mendapatkan pengetahuan tentang nilai memiliki hutan bakau serta memiliki pengalaman yang menarik.

2. Susur Laut

Wisata menyusuri pantai dengan perahu nelayan merupakan potensi wisata yang menjanjikan bagi para nelayan di kawasan Wisata Bahari Sontoh Laut. Wisatawan tak hanya bisa menikmati indahnya pesisir pantai, tetapi juga merasakan sensasi melihat burungburung beterbangan dan melihat aktivitas nelayan dalam mencari ikan. Rute menuju Gazebo Sontoh Laut dapat di tempuh dalam waktu +/- 10 menit dengan tarif yang terjangkau.

3. Gazebo Sontoh Laut

Kegiatan yang dapat dilakukan di gazebo sontoh laut adalah meliputi spot berfoto, berkumpul dengan keluarga menikmati view pemandangan yang dapat dilihat melalui gazebo. Menikmati pemandangan alam yang indah, dari sisi utara kita bisa melihat Pulau Madura dan menikmati lalu lalang kapal cargo menuju Terminal Teluk Lamong atau ke Perak, dan dari sisi selatan kita bisa menikmati indahnya hutan mangrove dan bunyi ribuan burungburung yang bersahutan adalah suatu pengalaman tersendiri.

4. Menara Pandang

Untuk membuat Wisata Bahari Sontoh Laut lebih menarik, beberapa upaya telah dilakukan. Adanya menara pandang setinggi 11 meter ini merupakan salah satu hasil upaya Pokdarwis untuk mempromosikan Wisata Bahari Sontoh Laut. Pengunjung dapat mengamati proses bongkar muat Depo Kontainer dari menara pandang, serta hutan bakau dan burung terbang. Selain itu, ketika berada di Menara Pandang ini, wisatawan bisa melihat berbagai satwa serta suara burung yang berkicau indah. Objek wisata ini berdekatan dengan pabrik perusahaan, maka sudah seharusnya setiap perusahaan memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar, yang merupakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat, atau yang lebih dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR).

Implementasi Pengembangan Wisata Bahari Sontoh Laut

Model implementasi kebijakan menurut George C. Edward III (1984:10), mengemukakan empat faktor atau variabel yang mempengaruhi berhasil tidaknya suatu kebijakan diimplementasikan. Komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi adalah empat variabel atau faktor yang dimaksud. Melalui variabel tersebut, peneliti

akan melihat bagaimana implementasi dalam pengembangan Wisata Bahari Sontoh Laut.

1. Komunikasi (*Communication*)

Peran Pemerintah dalam Pengembangan Wisata Bahari Sontoh Laut dapat dilihat dari kegiatan Pemerintah dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, kegiatan Pemerintah dalam mengadakan forum diskusi, kegiatan Pemerintah dalam pengadaan fasilitas penunjang wisata serta kegiatan dalam mendampingi pembentukan Pokdarwis Sontoh Laut.

Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya berupaya melibatkan masyarakat dalam pengembangan Wisata Bahari Sontoh Laut agar dengan adanya pariwisata tersebut dapat membantu perekonomian masyarakat. Peran masyarakat dalam pengembangan Wisata Bahari Sontoh Laut, mulai dari tahap perancangan hingga pelaksanaan suatu program sangat penting. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa Disbudporapar Kota Surabaya berperan sebagai fasilitator dengan menyediakan wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan pariwisata dengan membentuk dan menerbitkan SK Pokdarwis Sontoh Laut pada tahun 2019. Pokdarwis ini nantinya akan menjadi pendahulu cikal bakal adanya Wisata Bahari Sontoh Laut.

Pokdarwis Sontoh Laut mendapat pendampingan dari Pemerintah Kecamatan/Kelurahan selaku pemangku wilayah pada awal pendiriannya terutama dalam memberikan inspirasi agar mereka dapat bergerak untuk dapat mengembangkan kampungnya. termasuk memberi mereka inspirasi agar mereka bisa maju dalam memperjuangkan terciptanya suatu destinasi wisata. Pokdarwis Sontoh Laut didirikan untuk memberikan legalitas dan payung hukum khususnya untuk pengelolaan dana CSR PT. Pelindo untuk pengembangan pariwisata.

Berdasarkan temuan penelitian, terlihat jelas bahwa Disbudporapar Kota Surabaya berperan dalam memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan selama proses pembangunan Wisata Bahari Sontoh Laut. Ini sangat masuk akal mengingat penduduk setempat sangat akrab dengan lokasi dan keadaan objek wisata saat ini, membuat keterlibatan masyarakat sangat penting dalam hal pembangunan. Pokdarwis Sontoh Laut didirikan sebagai hasil dari upaya pemerintah untuk menampung ide-ide dari semua kelompok masyarakat tentang Wisata Bahari Sontoh Laut. Pendampingan pemerintah dalam menggali potensi kawasan wisata melalui diskusi dan musyawarah untuk menggali potensi daerah wisata.

Komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana Pemerintah Kota Surabaya melalui Disbudporapar Kota Surabaya mensosialisasikan tentang implementasi dalam pengembangan Wisata Bahari Sontoh

Laut kepada masyarakat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Disbudporapar Kota Surabaya masih kurang melakukan edukasi dan sosialisasi untuk merealisasikan kebijakan kepariwisataan. Implementasi kebijakan yang kurang optimal dapat dipengaruhi oleh hal tersebut.

Prospek dan peluang ekonomi masyarakat juga sangat bergantung pada komunikasi yang efektif. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surabaya dan instansi terkait telah berupaya untuk memfasilitasi pelatihan bagi usaha kecil atau industri kecil masyarakat. Gagasan korespondensi otoritas publik harus integratif, menyiratkan bahwa Pemerintah sebagai komunikator dan individu yang memperoleh data serta penerima manfaat berada pada posisi yang sama sehingga tujuan dapat dicapai dengan tepat. Penciptaan kesempatan untuk bertukar ide dan pemikiran selama proses pelatihan dan pendidikan melalui diskusi dan dialog sehingga setiap individu dapat secara efektif menerima ide dan materi terkait pemberdayaan.

Penting untuk menginformasikan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya tentang keberadaan tempat wisata sebagai sarana untuk mengurangi dampak negatif. Upaya pensosialisasian tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan:

- a. Komponen obyek wisata yang saat ini sangat potensial harus diinventarisasi dan diidentifikasi bersama masyarakat.
- b. Memperkenalkan objek wisata kepada masyarakat, serta organisasi pemerintah dan swasta, dalam rangka meningkatkan kesadaran akan keberadaan dan keunggulan pariwisata.
- c. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan melalui:
 - 1) Bersama masyarakat memasang papan informasi yang berisikan objek wisata potensial
 - 2) Bersama masyarakat terlibat dalam perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi objek wisata
 - 3) Bersama masyarakat melestarikan dan mempromosikan adanya Wisata Bahari Sontoh Laut serta menjaga ekosistem hutan mangrove serta fasilitas yang ada.

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dilakukan, bentuk komunikasi yang terjadi adalah melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Disbudporapar Kota Surabaya dalam menyebarkan kebijakan pengembangan wisata diselenggarakan melalui pertemuan bersama Pokdarwis di Kota Surabaya, tidak hanya kepada Pokdarwis Sontoh Laut saja. Pertemuan tersebut diselenggarakan setiap tahunnya sebanyak dua kali. Dalam pertemuan tersebut Disbudporapar Kota Surabaya mensosialisasikan terkait kebijakan yang ada dan juga para pelaku wisata dalam hal ini Pokdarwis menyampaikan keluhan yang terjadi yang

nantinya menjadi acuan Disbudporapar Kota Surabaya dalam membuat program dan kebijakan kedepannya.

Disbudporapar Kota Surabaya juga masih menggunakan metode konvensional dalam penyebaran informasi, seperti sosialisasi langsung kepada implementor kebijakan. Pendekatan konvensional ini memiliki sejumlah kekurangan yaitu membutuhkan lebih banyak uang, waktu, dan tenaga. Alasan mengapa Disbudporapar masih menggunakan cara konvensional adalah karena masih ada implementor kebijakan yang belum mengetahui perkembangan teknologi. Informasi yang diperoleh dari Informan mengatakan bahwa penyaluran informasi terkendala dengan cara komunikasi yang disampaikan. Konflik akan terjadi jika komunikasi disampaikan dengan cara yang tidak dapat diterima. Kesalahpahaman para aktor pelaksana kebijakan akan menjadi penghambat dalam implementasi pengembangan pariwisata.

Menurut hasil pengamatan peneliti, Disbudporapar Kota Surabaya telah berupaya membangun komunikasi namun, masyarakat masih belum sepenuhnya memahami tujuan dari penerapan kebijakan tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi langsung dari Disbudporapar Kota Surabaya. Hal ini mengakibatkan interpretasi yang salah dari masyarakat. Padahal Selama ini, hubungan baik telah terjalin baik antara Pemerintah melalui Disbudporapar Kota Surabaya dengan Pokdarwis Sontoh Laut. Hubungan baik tersebut terjalin karena adanya komunikasi interpersonal yang terjadi. Pokdarwis Sontoh Laut menjalin komunikasi dengan beberapa staf/pelaksana dari Disbudporapar Kota Surabaya baik melalui telepon atau melalui whatsapp pribadi. Selain itu, Disbudporapar Kota Surabaya juga selalu membuka ruang sharing dengan Pokdarwis Sontoh Laut, sehingga setiap pembuatan keputusan juga berdasarkan atas keluhan yang dirasakan oleh masyarakat setempat. Sehingga dalam pelaksanaan sosialisasi kebijakan pengembangan wisata berjalan baik karena adanya dukungan dari pelaku wisata tersebut.

Sedangkan, Implementasi Pengembangan Wisata Bahari Sontoh Laut terkendala oleh kemampuan Disbudporapar dalam mengkomunikasikan kebijakan dan melaksanakan pembangunan pariwisata, Akibatnya, pembuat kebijakan tidak mengetahui adanya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan pariwisata. Sehingga dampak program tidak terjadi seperti yang diharapkan. Selain itu, transmisi komunikasi kepada pemangku kepentingan—pelaksana yang tepat tidak dilaksanakan dengan baik (tidak terhubung), sehingga dukungan berupa komitmen dari semua pihak tidak berjalan seperti yang diharapkan. Pensosialisasian ini dapat menjadi bentuk kerjasama yang baik antara Pemerintah, Pokdarwis Sontoh Laut dan Masyarakat.

2. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya manusia sangat penting dalam perencanaan dan pengelolaan destinasi wisata. Pengembangan pariwisata tentunya memerlukan dukungan sumber daya manusia. SDM disini adalah orang-orang dengan keterampilan dan kemampuan yang sangat baik. Oleh karena itu, perlu dibuat program pelatihan pariwisata dalam mengembangkan personel yang berkualitas. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana seharusnya pengelolaan pariwisata yang baik dan program apa yang harus dikembangkan di tempat wisata tersebut. Berhasil atau tidaknya pengembangan wisata tergantung pada sumber daya manusia setempat yang mengelola daya tarik wisata tersebut. Masyarakat harus memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mengelola tempat wisata.

Namun, Peneliti menemukan bahwa pola perekrutan anggota Pokdarwis Sontoh Laut belum sesuai dengan kompetensi bidang dalam melaksanakan pengembangan pariwisata, hal ini dapat terjadi karena anggota Pokdarwis secara sukarela belum nampak melakukan pengembangan pembangunan sarana-prasarana objek Wisata Bahari Sontoh Laut. Sehingga, dampak yang ada masih kurang signifikan. Berikut adalah jumlah anggota menurut SK Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya, keanggotaan Pokdarwis Sontoh Laut yaitu 18 orang. Hal tersebut secara kuantitas peneliti nilai masih kurang dalam melakukan pengembangan wisata. Secara kualitas juga menunjukkan bahwa anggota Pokdarwis masih kurang memiliki latar belakang pariwisata yang spesifik, sehingga implementasi pengembangan pariwisata kurang berjalan secara optimal.

Kawasan wisata yang maju harus memiliki potensi sumber daya alam dan sumber dana (finansial) serta kesadaran masyarakat akan potensi wisata. Penempatan anggota Pokdarwis yang tidak sesuai dengan keahlian dan bidangnya serta kurangnya pelatihan yang dilakukan oleh Disbudporapar Kota Surabaya terkait kepariwisataan turut menyebabkan rendahnya SDM dalam pelaksanaan pembangunan kepariwisataan di Wisata Bahari Sontoh Laut.

Pemerintah sendiri tidak dapat mengontrol perkembangan industri pariwisata dengan segala keterbatasannya. Industri pariwisata mengalami kendala dari pemerintah dalam hal permodalan. Akibatnya, pemerintah perlu bekerjasama atau bermitra dengan aktor lain, terutama pihak swasta dan masyarakat. Secara umum dalam kebijakan kemitraan di bidang pariwisata telah dirumuskan pemerintah dalam pasal 17 UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang berbunyi: "Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara:

1. Membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dan
2. Memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar.”

Namun, kebijakan ini mencakup batasan ruang lingkup, kemitraan pemerintah, mekanisme dan peran semua pemangku kepentingan yang terlibat, dan pedoman pelaksanaannya. Dari sisi masyarakat, masyarakat yang berjualan belum merasa menjadi bagian integral dari penyusunan kebijakan pariwisata tersebut sehingga mereka memahami dirinya hanya sebagai objek dalam pengembangan wisata. Padahal point “g” pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisata mengamanahkan pengembangan wisata dilaksanakan dengan mendorong kemitraan dengan melakukan pembinaan usaha pariwisata termasuk pengusaha perorangan yang tergolong mikro dan kecil.

Selanjutnya mengenai dana untuk pengembangan Wisata Bahari Sontoh Laut, Adapun dana pengembangan Wisata Bahari Sontoh Laut adalah menggunakan dana CSR dari PT. Pelindo. Dana tersebut digunakan pada pembangunan infrastruktur berupa gazebo contoh laut, menara pandang, serta jembatan tunggu untuk pengunjung. Baik keuntungan finansial maupun nonfinansial akan dihasilkan dari kunjungan wisatawan ke destinasi wisata, namun pada bahasan ini akan fokus pada keuntungan finansial, khususnya manfaat peningkatan pendapatan. Sumber pendapatan objek Wisata Bahari Sontoh Laut berasal dari orang-orang yang berkunjung melalui penyewaan perahu dan jasa pengantaran ke gazebo contoh laut serta penjualan kuliner. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, pendapatan masyarakat jika ramai pengunjung kurang lebih mencapai 300 ribu rupiah. Karena tidak ada catatan keuangan tertulis untuk memberikan penjelasan mendalam tentang pengeluaran dan pendapatan setiap tahun, sehingga pendapatan hanya diestimasi.

Temuan penelitian juga menunjukkan mengenai peran Pemerintah yakni Disbudporapar Kota Surabaya dan Pokdarwis terlihat bahwa beberapa peran belum dapat diimplementasikan dengan baik, hal ini berarti terdapat adanya suatu masalah, kondisi sosio-ekonomi, sosiopolitik dan sosio-kultural adalah faktor yang menghambat proses pengembangan tersebut. Sehingga ditemukan bahwa:

- a. Sumber daya manusia Pokdarwis Sontoh Laut masih kurang memiliki motivasi, skill dan kesadaran diri untuk memanfaatkan potensi wisata yang ada. Sehingga objek Wisata Bahari Sontoh Laut belum dapat berkembang secara maksimal.
- b. Keterbatasan dana menjadi hambatan bagi pengembangan wisata. Namun, dalam mengatasi hambatan tersebut Pemerintah telah menjalin

kemitraan dengan masyarakat dan pihak swasta, salah satu upayanya yakni dengan adanya sponsorship berupa dana CSR PT.Pelindo III.

3. Disposisi (*Disposition*)

Diterima atau ditolaknya sikap pelaksana akan berdampak besar terhadap sukses atau gagalnya implementasi kebijakan. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang diterapkan tidak dikembangkan oleh masyarakat lokal yang benar-benar paham dengan persoalan yang mereka hadapi. Kebijakan yang akan diterapkan oleh pelaksana adalah kebijakan top-down yang mencegah pembuat keputusan untuk mengetahui apa yang dibutuhkan, diinginkan, atau masalah masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara bersama kelompok masyarakat yang menyebutkan bahwa sampai saat ini sikap para pelaksana sangat terbuka terhadap keterbatasan-keterbatasan yang ada di lapangan. Evaluasi yang diterima oleh Disbudporapar Kota Surabaya yang selanjutnya akan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kebijakan ke depan. Para implementor tidak serta merta menolak kebijakan tersebut, melainkan mereka memilih untuk mengoordinasikannya untuk menyelesaikan masalah meskipun ada kendala dan hasil yang belum tercapai secara maksimal.

Terlihat bahwa Pemerintah Kota Surabaya memiliki komitmen yang serius untuk menjalankan perannya guna mencapai tujuan kebijakan, terbukti dengan sikap menerima dan mendukung yang dilakukan oleh Disbudporapar Kota Surabaya. Sikap optimis ini mendorong pengembangan strategi baru untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksana mengakui kebutuhan mendesak untuk kebijakan pengembangan Wisata Bahari Sontoh Laut untuk memastikan implementasinya berkelanjutan. Tindakan pelaksana akan menghambat implementasi kebijakan jika ia tidak mendukung atau bahkan terkesan menolaknya.

Sikap dan tingkat komitmen terhadap kebijakan yang dibutuhkan tercermin dalam disposisi pelaksana. Disposisi dapat dipengaruhi oleh dua indikator yakni: a. Pengangkatan Birokrasi

Pengangkatan birokrasi merupakan pemilihan dan penetapan keanggotaan tim teknis pelaksana implementasi. Temuan penelitian ini menunjukkan belum adanya Tim Teknis atau Pokja Pengembangan Wisata Bahari Sontoh Laut. Sementara proses rekrutmen pengurus Pokdarwis Sontoh Laut diputuskan melalui musyawarah dan kemudian dikukuhkan oleh Kepala Disbudporapar Kota Surabaya. b. Insentif

Insentif merupakan uang yang diperoleh sebagai imbalan atas pelaksanaan tugasnya dalam pengelolaan Wisata Bahari Sontoh Laut. Untuk mencapai tujuan program pengembangan Wisata Bahari Sontoh Laut,

insentif bertujuan untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja pelaksana pengembangan wisata. Namun, berdasarkan temuan penelitian, Pokdarwis selaku pengelola tidak menerima kompensasi atau insentif dalam bentuk apapun. Demikian pula, Disbudporapar Kota Surabaya tidak pernah mengharapkan adanya penghargaan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk memastikan kinerja yang baik, tetapi semua orang sadar akan tanggung jawab masing-masing.

Menurut informasi yang diperoleh melalui wawancara, implementasi pengembangan Wisata Bahari Sontoh Laut belum optimal. Hal ini dikarenakan pengembangan pariwisata belum mencerminkan “kemauan” politik. Pemerintah belum menindaklanjuti rencana pengembangan pariwisata (grand desain) yang telah ada dan masyarakat belum sepenuhnya menggantungkan mata pencahariannya pada sektor pariwisata. Selain itu, kurangnya rasa kepemilikan dan upaya untuk menciptakan kreativitas.

4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Pada aspek ini menjadi aspek yang penting dikarenakan masih belum adanya peraturan pemerintah untuk mengatur perlindungan lebih lanjut mengenai hak-hak masyarakat, sehingga belum terdapat aturan mengenai keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan. Keberhasilan suatu program berdasarkan strategi pengembangan pariwisata di suatu daerah menentukan ada atau tidaknya suatu kelompok yang mengikuti kegiatan tersebut karena kehadiran suatu kelompok dapat menjalin ikatan baik yang bersifat *tangible* maupun *intangible*.

Lebih jauh lagi, pertemuan yang terjadi sebenarnya ingin memperluas pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi isu-isu penting yang terkait dengan pelaksanaan program. Disbudporapar Kota Surabaya dalam prosesnya telah mewadahi adanya pembentukan kelompok tersebut. Keberadaan kelompok juga memungkinkan anggotanya untuk berkolaborasi satu sama lain secara informal dan formal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta bekerja menuju tujuan bersama.

Untuk meningkatkan kemandirian, kelompok harus dibentuk.

Struktur birokrasi dipengaruhi oleh dua indikator yaitu: a. Standar Operasional Prosedur

Dalam pengelolaan Wisata Bahari Sontoh Laut, mengenai implementasi pengembangan pariwisata, belum ada standar operasional prosedur (SOP). Peraturan perundang-undangan daerah hanya dimaksudkan untuk memberikan pedoman yang luas bagi penyusunan garis besar kebijakan. Padahal SOP berguna untuk menstandarkan tindakan para pelaksana untuk menjamin efektifitas pelaksanaan program atau kebijakan. Meskipun tidak ada SOP resmi, ada referensi untuk implementasi operasional kebijakan pariwisata dalam berbagai dokumen

yang dihasilkan oleh rapat koordinasi/rapat implementasi kebijakan. Implementasi pengembangan Wisata Bahari Sontoh Laut melibatkan banyak pihak yaitu Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) yang melaksanakan fungsi utama sebagai penanggung jawab bidang pariwisata, Pemerintah Kecamatan/Kelurahan selaku pemangku wilayah dan Pokdarwis Sontoh Laut selaku pengelola. b. Fragmentasi

Penyebaran tanggung jawab kebijakan di antara unit-unit organisasi adalah fragmentasi. Adanya sosialisasi wajib dilakukan ke berbagai unit yang memerlukan koordinasi. Implementasi kebijakan yang sukses cenderung tidak terjadi dengan lingkup koordinasi yang lebih besar. Hal ini dapat dipahami mengingat sedikitnya unit atau pemangku kepentingan yang terlibat dalam implementasi kebijakan akan membuat koordinasi menjadi lebih mudah untuk dilaksanakan. Pengembangan Wisata Bahari Sontoh Laut ini melibatkan berbagai stakeholder, yaitu Disbudporapar Kota Surabaya, Pemerintah Kecamatan/Kelurahan, OPD terkait, serta Pokdarwis Sontoh Laut.

Pola koordinasi yang terjalin antar aktor inti kolaborasi (sektor Pemerintah) dan OPD terkait melibatkan beberapa aktor yang telah peneliti analisis ditemukannya perbedaan kepentingan antar stakeholder, dimana Disbudporapar memiliki kepentingan dalam penentuan kebijakan/legalisasi objek studi, sebagai koordinator kegiatan perencanaan dan pembangunan serta melakukan pembinaan dan pengendalian teknis di bidang pariwisata. Pemerintah kecamatan memiliki kepentingan dalam berkontribusi terhadap pengembangan pariwisata melalui pendekatan secara verbal dengan sosialisasi dan rebug warga. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, Pemerintah Kecamatan/Kelurahan bekerja sebagai pemangku wilayah untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan masyarakat setempat terhadap rencana pengembangan wisata yang dikeluarkan oleh Disbudporapar Kota Surabaya. Dalam konteks ini, sangat penting untuk melakukan pemantauan dan evaluasi, karena semua pihak yang terlibat harus mematuhi hasil evaluasi dan melaksanakan rekomendasi yang dihasilkan. Pengembangan kerjasama Wisata Bahari Sontoh Laut selama ini bersifat informal, demikian informasi dari narasumber penelitian.

Namun, ada kekurangan yang menjadi kendala, seperti tidak adanya referensi tertulis terkait teknis pengembangan kerjasama wisata bahari sontoh laut. Meski komunikasi dengan Pemkot Surabaya telah terjalin, bantuan pembangunan infrastruktur belum diberikan. Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti dapat menguraikan aspek-aspek penting dari fragmentasi adalah sebagai berikut:

a. Terdapat unit-unit organisasi dan individu-individu yang memiliki tanggung jawab;

- b. Organisasi secara keseluruhan disusun sedemikian rupa.
- c. Semua unit organisasi mengikuti jalan yang sama untuk mencapai sasaran atau tujuan yang sama.
- d. OPD sudah memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dan di dalam OPD terdapat lebih detail sub bidang yang bertanggung jawab terhadap pengembangan Wisata Bahari Sontoh Laut.
- e. Kolaborasi yang erat akan terjalin untuk mencapai tujuan yang diharapkan jika lembaga pemerintah, pemangku kepentingan terkait, dan masyarakat bekerja sama secara efektif.

Keterlibatan Masyarakat Dalam Mengelola Wisata Bahari Sontoh Laut

Dukungan dan keterlibatan masyarakat memainkan peran penting dalam menentukan apakah kebijakan pengembangan pariwisata berhasil atau gagal. Cohen dan Uphoff (dalam Dwiningrum, 2011:51) menjelaskan empat jenis partisipasi yaitu:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan (*Participation in Decision Making*)

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Diskusi dilakukan oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Sontoh Laut pada tahap perencanaan ini guna menyusun program yang selanjutnya akan diusulkan melalui Musrenbang. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, hanya sebagian kecil masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan, dan masyarakat lainnya hanya menerima ide-ide yang telah direncanakan oleh pengelola, membuat partisipasi masyarakat dalam hal perencanaan dan pengambilan keputusan untuk pengembangan Wisata Bahari Sontoh Laut kurang ideal.

Upaya yang dilakukan Pokdarwis Sontoh Laut dalam pengembangan kawasan Wisata Bahari Sontoh Laut adalah:

- a. Berusaha mendapat dukungan dari Pemerintah
- b. Promosi dimedia sosial melalui media sosial seperti instagram, tiktok dan lain-lain
- c. Mengadakan event-event untuk menarik wisatawan

Kinerja Pokdarwis Sontoh Laut sebagai pengelola wisata selama proses pemberdayaan dinilai kurang optimal karena berbagai kendala internal dan eksternal. Namun demikian, keberadaan komunitas Pokdarwis Sontoh Laut telah memberikan perubahan positif yang signifikan. Berdasarkan hasil penelitian, partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan dalam pengambilan keputusan hanya sebatas dukungan. Dukungan yang diberikan berupa menerima rencana sebelum keputusan diambil dan setelah keputusan diambil oleh pengurus Pokdarwis Sontoh Laut. Hal ini terlihat dari kurang terlibatnya masyarakat dalam rapat atau musyawarah secara langsung.

Kehadiran masyarakat Wisata Bahari Sontoh Laut dalam setiap pengambilan keputusan, hanya sebagian masyarakat yang berpartisipasi karena masyarakat sekitar Wisata Bahari Sontoh Laut terlalu sibuk dengan kegiatan masing-masing sehingga tidak bisa terlibat pada tahap ini. Masyarakat Sontoh Laut perekonomiannya adalah sebagai nelayan, sehingga dalam sehari-harinya mereka lebih mementingkan mencari ikan di laut dibanding ikut berpartisipasi untuk berdiskusi dan merencanakan pengembangan wisata.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan (*Participation in Implementation*)

Munculnya kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata yang ada menandai keterlibatan masyarakat dalam merintis Wisata Bahari Sontoh Laut. Namun, tidak seluruh masyarakat yang terlibat dalam merintis Wisata Bahari Sontoh Laut. Agar seluruh masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan daerahnya melalui sektor pariwisata, diperlukan proses penyadaran yang berkepanjangan.

Pada tahap partisipasi dalam pelaksanaan, kontribusi masyarakat dibagi menjadi dua kategori, kontribusi yang dilakukan dengan tenaga dan kontribusi yang dilakukan dengan bahan/materi.

a. Kontribusi dengan tenaga

Partisipasi masyarakat dapat dilihat dalam bentuk melayani sebagai pemandu wisata bagi pengunjung ke gazebo sontoh laut. Pokdarwis Sontoh Laut bertugas melaksanakan dan mengkoordinir peran serta masyarakat dalam pembangunan atau pekerjaan. Masyarakat sendiri merasa bertanggung jawab untuk membantu dan berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata. Mereka bersama-sama bahu-membahu dalam mengembangkan Wisata Bahari Sontoh Laut. Pengakuan masyarakat yang dimintai keterangan mengaku menjalankan semuanya dengan ikhlas. Semuanya dilakukan dengan bantuan dari anggota masyarakat lainnya.

b. Kontribusi dengan bahan
Kontribusi dengan bahan ini meliputi keikutsertaan masyarakat dalam memberikan sumbangan berupa bahan-bahan fisik. Bentuk kontribusi ini adalah dengan masyarakat berkontribusi dengan bersediannya perahu mereka yang digunakan untuk mencari ikan digunakan juga sebagai perahu wisata.

3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat (*Participation in Benefits*)

Keikutsertaan dalam hal ini adalah mengikuti kegiatan usaha ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Partisipasi dalam menerima manfaat tersebut berarti mengalami perkembangan fisik dan non fisik masyarakat sebagai hasil dari pelaksanaan program atau pembangunan. Masyarakat dapat memanfaatkan pengelolaan Wisata Bahari Sontoh Laut ini dalam upaya membuka usaha atau terlibat dalam pengembangan wisata

itu sendiri. Wisata ini diharapkan dapat membantu masyarakat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosialnya dengan menghasilkan keuntungan yang signifikan dari kegiatan wisata. Adapun kategori manfaat berikut dapat ditentukan: a. Manfaat sosial

Wisata Bahari Sontoh Laut harus dibingkai dalam lingkungan budaya dan sosial setempat dan bukan sebaliknya. Bagi masyarakat, manfaat ekonomi merupakan motivasi yang nyata dan utama. Namun, partisipasi dalam pengambilan keputusan merupakan rute utama menuju pemberdayaan karena terkait langsung dengan pembahasan tentang jenis-jenis pembangunan di tingkat lokal. Pemberdayaan dan tanggung jawab bersama, oleh karena itu, melibatkan konsolidasi kekuatan sosial, membangun kepercayaan pada kemampuan masyarakat sendiri dan kebanggaan akan adanya wisata. b. Manfaat ekonomi

Community Based Tourism dapat menghasilkan manfaat ekonomi, dan merupakan kebijakan yang menentukan manfaat mana yang menjangkau masyarakat dan berkontribusi pada kesejahteraan mereka. Berpartisipasi dalam kegiatan dalam usaha ekonomi dan memberikan layanan pengantaran wisatawan ke Gazebo Sontoh Laut merupakan dua contoh kegiatan yang dilakukan masyarakat yang berdampak pada perekonomian masyarakat. Perekonomian masyarakat Sontoh laut adalah nelayan, kehidupan mereka bergantung pada hasil laut. Usaha yang ada di Wisata Bahari Sontoh Laut seharusnya beroperasi secara permanen, namun karena masalah pengunjung tidak datang setiap hari, sehingga masyarakat tidak dapat melanjutkan usahanya. Dengan kata lain, pengelola perlu mendiversifikasi ekonomi mereka dengan menambahkan bisnis seperti membuat kerajinan dari kerang dan biota laut untuk dijadikan souvenir maupun hiasan buah tangan. Dengan melakukan ini, mereka dapat berkembang lebih dari sekadar berfokus pada penangkapan ikan. Pengambilan manfaat dengan adanya objek Wisata Bahari Sontoh Laut bisa dikatakan belum maksimal, seharusnya pemanfaatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan manfaat ini dimanfaatkan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga baik secara ekonomi maupun kesejahteraannya. Minimnya kesadaran masyarakat akan potensi pengembangan pariwisata menyebabkan masyarakat belum dapat meraup keuntungan ekonomi secara maksimal selama ini. Potensi pariwisata hanya dipahami sebagian masyarakat saja. c. Manfaat lingkungan

Pemanfaatan sumber daya alam dan konservasi yang berkelanjutan merupakan persyaratan untuk pemeliharaan jangka panjang wisata berbasis alam dan ekowisata dan merupakan manfaat utama yang paling sering disebutkan oleh masyarakat. Aktivitas perusahaan dan industri pabrik yang ada di Wisata Bahari Sontoh Laut tidak hanya menimbulkan ancaman terhadap stabilitas ekosistem

kawasan, tetapi juga kerentanan bagi penduduk setempat yang akan menghadapi potensi masalah akibat penyalahgunaan sumber daya alam. Dengan mengikuti kegiatan menjaga kelestarian lingkungan hutan mangrove, masyarakat Sontoh Laut berkontribusi dalam kegiatan yang berdampak lebih besar terhadap lingkungan.

4. Partisipasi dalam evaluasi (*Participation in Evaluation*)

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui kekurangan-kekurangan dalam implementasi kebijakan pengembangan Wisata Bahari Sontoh Laut. Perlu adanya perbaikan kekurangan dalam pelaksanaan pembangunan pariwisata. Selama ini evaluasi terhadap pengembangan pariwisata sudah sering dilakukan. Tahap evaluasi tersebut dilakukan secara diskusi.

Jika program telah beroperasi setidaknya selama jangka waktu tertentu, evaluasi dapat dilakukan berdasarkan tahapan desain dan jenis program yang dipilih pada saat perencanaan. Setiap tiga bulan, pengelola melakukan evaluasi; ini merupakan periode waktu yang panjang untuk evaluasi. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Sontoh Laut membutuhkan partisipasi masyarakat dalam semua kegiatan; pengelola adalah orang yang mengawasi dan merencanakan suatu acara di dalam objek yang dikelola; pengelola memiliki kewenangan untuk mengadakan diskusi atau pertemuan dimana anggota masyarakat dapat berpartisipasi dan menyuarakan pandangan mereka tentang Wisata Bahari Sontoh Laut sehingga masyarakat umum dapat mengetahui keuntungan dari memiliki objek wisata tersebut.

Salah satu tantangan yang dihadapi Pokdarwis Sontoh Laut adalah masyarakat yang ada tidak mempedulikannya dan hanya sedikit orang yang terlibat. Partisipasi dari anggota kelompok yang disibukkan dengan kegiatan masing-masing merupakan alasannya. Menurut hasil wawancara, tidak semua masyarakat berpartisipasi dalam tahap evaluasi; biasanya, hanya pengurus yang memberikan masukan, kritik, dan saran kepada pemerintah..

Masyarakat Sontoh Laut memandang keberadaan Wisata Bahari Sontoh Laut sebagai salah satu bentuk wisata yang memiliki potensi yang baik dan potensi yang dapat bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Perekonomian masyarakat kemudian dapat didorong oleh kegiatan yang diarahkan oleh Pokdarwis Sontoh Laut, selaku pengelola. Akibatnya, terbukti bahwa wisata tersebut tidak ditentang oleh masyarakat sekitar. Kawasan Wisata Bahari Sontoh Laut juga memiliki gazebo, mushola, jembatan tunggu, toilet umum, dan ruang informasi. Hanya saja fasilitas yang sudah ada tidak sepenuhnya sempurna.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk implementasi pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Wisata Bahari Sontoh Laut berupa pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) untuk mengembangkan dan mengelola potensi wisata yang sudah ada. Sarana dan prasarana yang belum memadai, koordinasi yang kurang, dan minimnya wahana tujuan wisata menjadi kendala dalam implementasi kebijakan pariwisata berbasis masyarakat di Wisata Bahari Sontoh Laut. Berdasarkan temuan analisis ini, kebijakan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini juga didukung oleh analisis yang dilakukan di lapangan yang menunjukkan bahwa Pokdarwis Sontoh Laut sebagai penanggung jawab masih kurang memiliki kesadaran, motivasi, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memanfaatkan potensi wisata. Oleh karena itulah pengembangan Wisata Bahari Sontoh Laut belum dapat berkembang secara maksimal.
2. Sebagai subjek dan objek pembangunan pariwisata, masyarakat harus selalu dilibatkan dalam keseluruhan prosesnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pariwisata, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, dan menjaga karakteristik lingkungan dan alam. Sehingga penduduk setempat harus berpartisipasi dan merasakan manfaatnya. Salah satu strategi yang memberikan peran yang baik bagi masyarakat lokal adalah pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Berdasarkan temuan penelitian yang telah dilakukan, keterlibatan masyarakat Sontoh Laut dalam menjaga, memelihara dan mengembangkan Wisata Bahari Sontoh Laut hanya sebagian saja dari masyarakat yang ikut berpartisipasi. Minimnya partisipasi masyarakat dalam pertemuan atau musyawarah secara langsung menjadi bukti kurangnya kesadaran masyarakat terhadap potensi pariwisata.

SARAN

Berdasarkan hasil temuan yang didapat dari penelitian ini, peneliti dapat memberikan ide dan saran sebagai berikut:

1. Agar implementasi pengembangan Wisata Bahari Sontoh Laut memberikan dampak positif yang lebih besar maka Pemerintah Kota Surabaya melalui Disbudporapar Kota Surabaya Perlu percepatan pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung pariwisata, dan untuk mengoptimalkan implementasi pengembangan pariwisata di Wisata Bahari Sontoh Laut, Disbudporapar Kota Surabaya seharusnya lebih

sering dalam mengadakan pelatihan-pelatihan atau workshop tentang pariwisata.

2. Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan segala kegiatan terkait pariwisata di Wisata Bahari Sontoh Laut, perlu adanya kerjasama yang efektif antara pemerintah dan masyarakat setempat. serta perlu diadakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk pengembangan pariwisata di Wisata Bahari Sontoh Laut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian artikel ilmiah ini, khususnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan segala kebaikan untuk memudahkan peneliti mulai dari survey hingga sidang akhir
2. Papa, Ibu dan keluarga yang selalu memberikan dukungan berupa doa, motivasi, cinta kasih dan segala dukungannya
3. Prof. Dr. H. Nurhasan, M.Kes. sebagai Rektor Universitas Negeri Surabaya, yang telah membina Universitas ini dengan sebaik-baiknya.
4. Dr. Bambang Sigit Widodo, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum yang telah membina fakultas ini dengan sebaik-baiknya.
5. Dosen Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya yang telah mendidik dan memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan.
6. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan diatas, yang telah membantu dan mendukung terlaksananya penyusunan artikel ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adu-Ampong, E. A. (2017). Divided we stand: Institutional collaboration in tourism planning and development in the Central Region of Ghana. *Current Issues in Tourism*, 20(3), 295–314.
- Angga Wijaya Holman Fasa, M. B. (2022). STRATEGI PENGEMBANGAN DESA WISATA BERKELANJUTAN DI INDONESIA: PENDEKATAN ANALISIS PESTEL. *Kajian* <http://dx.doi.org/10.22212/kajian.v27i1.3612>.
- Arghutashvili, V. (2018). the Role of Tourism in Economic Development of Georgia. *Journal of International Management Studies*, 18(2), 59–64. <https://doi.org/10.18374/jims-18-2.6>

- ARYAWAN ASASANDI, I. G. N., & AFZAL, M. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dengan Konsep Cbt (Community Based Tourism) Di Desa Labuan Pandan. *Ganec Swara*, 13(2), 351. <https://doi.org/10.35327/gara.v13i2.102>
- Damanik, Janianton, 2013 “Pariwisata Indonesia (Antara Peluang Dan Tantangan)”, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Dewi Safitri, M. S. (2002). PENGEMBANGAN PARIWISATA MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DILIHAT DARI PERSPEKTIF IMPLEMENTASI KEBIJAKAN. *Journal of Comprehensive Science p-ISSN: 2962-4738 e-ISSN: 2962-4584 Vol. 1 No. 4 November 2022*.
- Diana, & Setiawan, A. B. (2021). Evaluasi Penerapan Community Based Tourism (CBT). *EFFICIENT: Indonesian Journal of Development Economics*, 4(1), 1044–1065. <https://doi.org/10.15294/efficient.v4i1.42541>
- Dodds, R., Ali, A., & Galaski, K. (2018). Mobilizing knowledge: Determining key elements for success and pitfalls in developing community-based tourism. *Current Issues in Tourism*, 21(13), 1–22.
- Fianto, A.Y. (2020). COMMUNITY-BASED MARINE TOURISM DEVELOPMENT IN EAST JAVA PROVINCE, INDONESIA. *ABAC Journal*, 40, 1-26.
- Irawan Suntoro, dan, Hasan Hariri. 2015. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha ilmu.
- Jafar, R., & Meilvidiri, W. 2017. Latar Belakang *Jurnal Ecosystem Volume 17 Nomor 2*, Mei – Agustus 2017 *Jurnal Ecosystem Volume 17 Nomor 2*, Mei – Agustus 2017, 17, 774–781
- Krisnasari, R., Tinggi, S., Trisakti, P., & Pariwisata, P. (2022). *Community Based Tourism Desa Pangandaran dan Desa Pananjung Dalam Pengembangan Wisata Alam di Kawasan Pantai Pangandaran Jawa Barat*. 3(1), 0–6.
- Maharani, M. A., Astuti, P., & Marlina, N. (2021). Community Based Tourism Dalam Pengelolaan Pariwisata Mangrove Demang Gedi Di Kabupaten Purworejo. *Jurnal FISIP Universitas Diponegoro*.
- Manyara, G., & Jones, E. (2007). Communitybased tourism enterprises development in Kenya: An exploration of their potential as avenues of poverty reduction. *Journal of Sustainable Tourism*, 15(6), 628–644.
- Mayaka, M., Croy, W. G., & Cox, J. W. (2018). Participation as motif in community-based tourism: A practice perspective. *Journal of Sustainable Tourism*, 26(3), 416–432. doi: 10.1080/09669582.2017.1359278
- Nurhajati, N. 2018. "Dampak Pengembangan Desa Wisata Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Desa Mulyosari Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung)". *Publicianan*. Vol.11(1). Hlm. 1-13.
- Nur R, A. H., Lituhayu, D., & Djumiarti, T. (2022). Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Semarang pada Obyek Wisata Palagan Ambarawa. *Journal of Public Policy and Management Review*, 11(4), 353–368
- Okazaki, E. (2008). A community-based tourism model: Its conception and use. *Journal of Sustainable Tourism*, 16(5), 511–529.
- Pakhudin, Arenawati, & Stiawati, T. (2022). Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Daerah Banten Lama Kota Serang. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 10(1), 151–167. <https://doi.org/10.30656/sawala.v10i1.4096>
- Pendit, Nyoman S. 2006. *Ilmu Pariwisata*. Jakarta : PT Pradnya Paramita.
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataaan.
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.
- Pitana, I.G, dan Gayatri, P.G., 2005, *Sosiologi Pariwisata*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Ramdhani, D. S., & Rahaju, T. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Studi Pada Komunitas Bank Sampah Bintang Mangrove Kelurahan Gunung Anyar Tambak, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya). *Publika*, 10(3), 9-25.
- Rahaju, Tjitjik., Suryono, Agus., Mardiyono., & Rochmah, Siti., 2020. “Strengthening Capacity through Expansion of Community Participation in Mangrove Ecotourism Management in Pamurbaya” dalam *Journal of Public Administration Studies Volume 5* (hal 100-102). Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Rohyani, I. S., Nursalim, I., & Arminy, N. S. (2019). Pengembangan Potensi Wisata Melalui Optimalisasi Peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Arjanga. *Abdi Insani*, 6(3), 332–339.

- <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v6i3.254>
- Satrio, D., & Sabana, C. (2018). Pengembangan Community Based Tourism Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, 32(1), 31-35. <https://doi.org/10.31941/jurnalpena.v32i1.935>
- Sayogi, K. W., & Demartoto, A. (2018). PENGEMBANGAN PARIWISATA BAHARI (Studi Deskriptif Pada Pelaku Pengembangan Pariwisata Bahari Pantai Watukarung Desa Watukarung Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan). *Journal of Development and Social Change*, 1(1), 9. <https://doi.org/10.20961/jodasc.v1i1.20728>
- Selamat Joko Utomo, B. S. (2017). STRATEGI PENGEMBANGAN DESA WISATA DI KECAMATAN KARANGPLOSO KABUPATEN MALANG. *Jurnal Neo-Bis Volume 11, No.2, Desember 2017*
- Setiawan, B., & Kurniawan, B. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Wisata Taman Bulak Kenjeran Di Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak Kota Surabaya. *Publika*, 9, 409-418. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n4.p409-418>
- Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta.
- Sunaryo, B. 2013. Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media
- Tengah, S. L. (2020). PERANAN POKDARWIS BATU REJENG UNTUK MENGEMBANGKAN DESA SENTILING LOMBOK TENGAH. 1(1).
- Ulber, Silalahi. (2009). Metode Penelitian Sosial. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
- Utami, R. C., & Hartono, D. (2016). Analisis Daya saing Harga Pariwisata Indonesia: Pendekatan Elastisitas Permintaan. *Jurnal Kepariwisataaan Indonesia*, Vol. 11 No, 93-118
- Wahab, Solichin Abdul, 2012. Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Modelmodel Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wijaya, S. A., Zulkarnain, & Sopingi. (2016). Proses Belajar Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dalam Pengembangan Kampoeng Ekowisata. *Jurnal Pendidikan Nonformal*, XI(2), 88-96
- Winarno, Budi. 2014. Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus). Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Yakup, A. P., & Haryanto, T. (2021). Pengaruh Pariwisata terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Bina Ekonomi*, 23(2), 39-47. <https://doi.org/10.26593/be.v23i2.3266.39-47>
- Yanes, A., Zielinski, S., Cano, M. D., & Kim, S. Il. (2019). Community-based tourism in developing countries: A framework for policy evaluation. *Sustainability (Switzerland)*, 11(9), 1-23. <https://doi.org/10.3390/su11092506>